

Education of the oppressed in minangkabau (1902-1942)

Safri Mardison^{*}, Fitri Handayani^a

^a*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia*

^{*}E-mail: safrimardison@uinib.ac.id

Abstract: This journal is entitled "Education of the Oppressed in Minangkabau (1902-1942)". This research is motivated by the policy issued by the Dutch Colonial Government regarding Ethical politics. In this ethical policy the most attention is the issue of education for the natives. Education that was previously only given to the nobility. With this Ethical policy, the community was given the opportunity to get an education from a Dutch school. The aim of this research is to find out the history of the education of the oppressed in Minangkabau during the Dutch colonial rule (1902-1942). For this research, the method used is library research using a philosophical approach and a historical approach.). Sources of data used are primary and secondary sources. The steps of this research: (1) Heuristics, namely collecting sources, both primary sources and secondary sources. (2) Criticizing the sources of the existing data with internal and external criticism. (3) Interpretation which is an analysis of the data and interpreting it. (4) Historiography is the writing of historical stories in the form of scientific works. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis technique and content analysis. The results of this study are, First, the Dutch colonial period in Minangkabau has changed life in society, people do not get good treatment from the Dutch government. Small people often get oppression from Dutch government policies. Indigenous people did not get the opportunity to study in Dutch schools, because education was only given to the children of the nobility. The Dutch gave the local authorities an opportunity in matters of government, but remained under Dutch rule. Then in 1908 forced cultivation in Minangkabau was abolished. This is because many people suffer from heavy workloads and high taxes. The rights to land ownership and other rights were also confiscated and harassed by the Dutch. Second, the education system implemented by the Dutch was to provide education for Dutch children and indigenous people. Dutch education in Minangkabau developed rapidly. The schools established by the Dutch government are, first grade schools, second grade schools, Village schools (Volksschool), Europese Lagere School (ELS), Hollands Chinese School (HCS), Hollands Inlandse School (HIS), etc.

Keywords: Education, the oppressed

PENDAHULUAN

Kolonialisme merupakan suatu usaha untuk menguasai wilayah bangsa lain yang bertujuan untuk menguasai atau mendapatkan sumber daya suatu bangsa yang dikuasai demi pengolahan industrialisasi di Negara kolonisator. Dalam hal ini kesejahteraan maupun pendidikan di daerah koloni tidak diperhatikan. Indonesia yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. (Alifia Nurhusna Afandi, dkk. Jurnal Artefak Vol.7 No.1, April 2020, hal. 22) Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu hal yang penting untuk dikaji adalah perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Penggolongan pendidikan yang seperti ini, menunjukkan bahwa semakin kecil kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan bersama-sama dengan kaum bangsawan, hal ini semakin mempertegas diskriminasi dalam aspek pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. (Veronika Horohiung. Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.5 No.2 Juli 2016, hal. 56)

Sistem pendidikan pada masa ini, pada umumnya dianggap sebagai alat untuk menyeleksi dan melatih orang Indonesia untuk memegang status dalam masyarakat. Hal-hal tersebut menimbulkan kritik dari berbagai kalangan seperti yang ditulis oleh Multatuli (Douwes Dekker) dalam bukunya Max Havelaar (1860)

yang menceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat mendapat tekanan dari pemerintah kolonial. (Alifia Nurhusna Afandi, dkk. hal. 23)

Sehingga gagasan tersebut ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina, tepatnya pada 17 September 1901 Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan Politik Etis, yang terangkum dalam tiga program utama, yang pertama Irigasi ialah program untuk memperbaiki pengairan pada lahan-lahan pertanian rakyat bumiputera dengan membangun bendungan dan jalur-jalur pengairan. Yang kedua Imigrasi, yaitu program untuk pemerataan penduduk dari pulau Jawa yang padat menuju daerah-daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya. Yang ketiga Edukasi yakni program untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat bumiputera dengan pemerataan kesempatan belajar dan pendirian sekolah-sekolah rakyat.

Pengaruh Belanda mulai merusak struktur dan moral adat Minangkabau. Mereka dipersiapkan dengan pendidikan Barat yang bertentangan dengan hidup golongan adat dan kaum agama di Minangkabau. Tetapi kenyataannya, mereka mulai dapat melihat keburukan Belanda dan kesengsaraan hidup bangsanya. Pada saat itu mereka terpaksa diam saja, karena mereka belum merupakan golongan yang kuat yang dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda yang telah tertanam kuat di Minangkabau (M. Syarif, 2019, hal. 112-113)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti pemikiran-pemikiran beliau yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa jurnal yang berjudul "Pendidikan Kaum Tertindas di Minangkabau Tahun 1902-1942".

METODE

Dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, hal. 49)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. sumber primer yang dimaksud adalah data sumber yang akan penulis jadikan acuan utama dalam penulisan. Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Pustaka (Library Research), Dokumentasi, Mengakses Internet.

Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai : Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji, Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui buku- buku maupun sumber lainnya, serta menganalisis dan mengklarifikasikan, dan langkah terakhirnya dengan cara mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.

Penulisan

Data yang tersaring melalui analisis dan dirangkai dengan menggunakan interpretasi, kemudian dideskripsikan secara ilmiah sehingga menghasilkan karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kaum Tertindas di Minangkabau

1. Kondisi Sosial

Masyarakat Minangkabau masa pemerintahan Kolonial Belanda sering mendapatkan tekanan, tersebut barawal dari diterapkannya Sistem Tanam Paksa dan Politik Liberal yang menyebabkan kemiskinan di masa pemerintahan Hindia Belanda. Diberlakukannya Sistem Tanam Paksa mendapat kritik dari kelompok pembela pribumi, yaitu tiga tokoh yang terdiri dari, Inspektur Pertanian (L. Vitalis), Kepala Dinas kesehatan (dr. W. Bosch), dan seorang pendeta untuk Hindia Belanda yang kemudian menjadi anggota parlemen (W. R. Baron van Hoevell) yang membela Hindia Belanda dan memandang bahwa PKB harus diperhatikan. dan memenuhi kepentingan masyarakat pribumi. (Daliman, hal. 56).

2. Kondisi Pendidikan

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan pada kepentingan penjajah.

a. Pendidikan Sebelum Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

- Pendidikan Informal. Pendidikan informal adalah merupakan suatu proses yang sesungguhnya terjadi seumur hidup yang karenanya tiap-tiap individu memperoleh sikap, nilai, keterampilan dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari dan pengaruh lingkungannya dari famili atau keluarga dan tetangga, dari pekerjaan dan permainan. Pendidikan informal di jalankan dalam lingkup keluarga di Minangkabau pendidikan di lakukan di rumah (rumah Gadang) dan di suarau. Pendidikan dalam rumah Gadang di lakukan oleh anak dan orang tua (Ibu/Ayah), namun pendidikan juga di lakukan antara mamak dan kemenakan. Di Minangkabau Seorang mamak selalu mengunjungi kemenakannya di rumah Gadang, dengan tujuan memberikan pengajaran nilai-nilai agama dan adat istiadat di Minangkabau.
- Pendidikan Non Formal. Sebelum masuknya Kolonial Belanda di Minangkabau, masyarakat Minangkabau telah memiliki model pendidikan tradisional yang membentuk karakter orang Minangkabau itu sendiri. Pendidikan tradisional pada masyarakat Minangkabau berlangsung dalam bentuk pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di surau. Surau adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Surau merupakan sebuah komponen yang interes, muncul dan berkembang bersama dalam perpaduan adat Minangkabau dan agama Islam selama ratusan tahun. (Irhas Fansuri Mursal, Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, hal. 100).

b. Pendidikan Masa Kolonial Belanda

- Pendidikan lokal Minangkabau masa Politik Etis. Pada awal tahun 1900 pendidikan di Minangkabau masih berupa lembaga pendidikan surau. Pelajaran-pelajaran yang memang biasa di berikan seperti fiqh dan tafsir al-Qur'an merupakan pelajaran utama dalam surau tersebut. Pelajaran yang lebih ditekankan adalah pelajaran ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya.
- Pengaruh Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan. Penerapan Politik Etis sangat berdampak penting terhadap lahir lahirnya pendidikan di Indoensia. tahun 1909 pendidikan mendapatkan perhatian dengan berkembangnya produk industri. Berkaitan dengan arah Politik Etis yang menjadi landasan politik kolonial, maka pemerintah kolonial membuat strategi dengan sistem pendidikan dan pengetahuan Barat yang dilaksanakan sebanyak mungkin. Dengan demikian, bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar di berbagai sekolah Bumi putera, dan pemberian pendidikan rendah untuk golongan Bumi putera yang disesuaikan dengan keperluan mereka. (Irhas Fansuri Mursal, Jurnal Pendidikan, 2016 hal. 3)
- Kondisi Pemerintahan. Sejak Letkol. Raaff memperkenalkan dualisme corak pemerintahan di Minangkabau, Penguasa kolonial Belanda memiliki keinginan untuk menerapkan nilai-nilai aristokrasi di daerah ini. Sejalan dengan tujuan penguasa kolonial Belanda, Letkol Raaff sengaja menyusun bentuk pemerintahan yang baru secara hirarki, mulai dari tingkat dusun sebagai unit kekuasaan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kepala Nagari dan penghulu yang memimpin sebuah dusun ditentukan pula oleh pemerintahan kolonial Belanda. Usaha Belanda untuk mengenalkan hirarki pemerintahan di Minangkabau mendorong mereka untuk ikut campur dalam urusan nagari. Usaha inilah yang mengekang fungsi politik tradisional Minangkabau dan menghambat berbagai perubahan. (Erman, Imam Bonjol Press, hal. 12-13).
- Kondisi Ekonomi. Sebelum masa kolonial, kehidupan perekonomian di wilayah Minangkabau cenderung subsisten; mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok wilayah mereka sendiri. Kebanyakan penduduknya ialah petani, lalu ada pula penenun, pandai besi, dan pedagang.

Sistem Pendidikan untuk Kaum Tertindas di Minangkabau

Pendidikan untuk Anak Belanda. Untuk anak-anak Eropa, ada tiga tingkat sekolah dasar yang dinamakan yaitu E.L.S. (Europeesche Lagere School) lama belajar enam tahun. Didirikan di Jakarta pada tahun 1816. Kemudian disekitar tahun 1900-1940 perkembangan jumlah sekolah dan murid tidak mengalami perkembangan yang berarti, akan tetapi setelah tahun 1900 jumlah anak-anak pribumi yang memasuki E.L.S. meningkat. Kemudian jenis kedua adalah sekolah menengah. Sekolah menengah terdiri dari H.B.S. (Hooger Burger School) lima tahun dan H.B.S. tiga tahun. Sekolah ini didirikan pada tahun 1867 di Jakarta. Sebelumnya telah ada Gymnasium enam tahun didirikan pada tahun 1860 di Jakarta yang diberi nama Gymnasium III. Tamatan H.B.S. lima tahun dapat melanjutkan ke Universitas, dan H.B.S. tiga tahun ke sekolah kejuruan atau dapat juga ke H.B.S. lima tahun di kelas IV.

Dalam tahun 1903 didirikan sekolah M.U.L.O. tiga tahun dan dianggap sederajat dengan H.B.S. tiga tahun. Tamatan M.U.L.O. dapat melanjutkan ke H.B.S. lima tahun di kelas IV. Baik H.B.S. tiga tahun maupun M.U.L.O. sebenarnya dipersiapkan untuk memasuki sekolah kejuruan. Pemilik ijazah M.U.L.O. mempunyai arti penting karena mendapat posisi yang baik di dalam masyarakat.

Kemudian tahun 1919 didirikan A.M.S. (Algemeene Middlebare School). Sekolah ini merupakan lanjutan M.U.L.O. yang lama belajarnya tiga tahun, Jenis ketiga adalah Universitas, yang terdiri dari tiga sekolah tinggi, yaitu : Kedokteran Batavia 1927, ITB 1920, dan Recht Hoge School, Jakarta 1924. (Sangkot Nasution, Jurnal Pendidikan Belanda, Masa Kolonial, 2016, hal. 255)

Perkembangan Sistem Sekolah untuk Kaum Tertindas

Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah di Minangkabau dengan berangsur-angsur walaupun rakyat sangat membutuhkan pendidikan tersebut, terutama yang tinggal di desa-desa. Bagi mereka untuk pergi belajar ke Bukittinggi dan Padang tidak mungkin, karena kehidupan belum memungkinkan. Biaya sekolah belum terjangkau oleh rakyat biasa, dan dengan demikian orang yang mendapat pendidikan hanya terbatas. (Mardjani Martamin, dkk, hal. 75).

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau

1. Sekolah Kelas Satu (1910)
Sekolah ini disediakan untuk anak-anak penghulu dan pegawai pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak mereka.
2. Sekolah Kelas Dua
Sekolah ini didirikan untuk kalangan mana saja tanpa membedakan status sosial. Jumlah sekolah ini masih sangat terbatas dan hanya didirikan pada masing-masing distrik (kecamatan) yang ada di suatu Keresidenan tanpa mempertimbangkan kepadatan penduduk dan minat pendidikan masyarakat setempat.
3. Sekolah Desa (1912)
Di Minangkabau Volksschool lebih dikenal dengan nama Sekolah Desa dan jumlahnya mencapai sekitar 358 buah sekolah. Untuk dapat mendirikan Sekolah Desa, yang derajatnya lebih rendah dari Sekolah Kelas Dua nagari yang berkeinginan, harus menyediakan persyaratan yang berat, seperti mempersiapkan tanah, gedung, perabot, dan alat sekolah serta gaji guru.
4. Sekolah Lanjutan (1916)
Vervolgschool pertama kali didirikan di Minangkabau baru tahun 1916, terutama pada tempat yang sudah ada beberapa Volksschool. Dengan dibukanya Sekolah Lanjutan, yaitu nama Vervolgschool di Minangkabau, maka Sekolah Desa yang semula hanya untuk tiga tahun ajaran, dijadikan dua tahun, sesudah itu mereka dapat melanjutkan di Sekolah Sambungan.
5. Sekolah Normal (Normal School)
Dengan didirikannya Sekolah Lanjutan pada tahun 1916 dan Sekolah Raja di Bukittinggi pada tahun 1856 juga belum mampu menampung para lulusan Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan pendidikan. Kondisi semacam ini yang mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk membuka Normal School di Padang Panjang bagi para lulusan Sekolah desa yang tidak dapat melanjutkan ke Sekolah Raja pada tahun 1916. Di samping sekolah tersebut didirikan juga sekolah khusus untuk orang Cina dengan nama Hollands Chinese School (HCS) dan Amhonsche School untuk orang Ambon yang tinggal di Minangkabau pada waktu itu, kedua sekolah tersebut terdapat di Padang. Kemudian, di Payakumbuh didirikan sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang lama pendidikannya 3 tahun atau ada juga yang 4 tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu 1) sebelum masuknya pengaruh asing. Hasil pertanian dan hasil hutan merupakan sumber ekonomi utama. Kedatangan Belanda ke daerah ini menjadikan Minangkabau memasuki era kolonialisme. Dengan kedatangannya ke Minangkabau membawa perubahan besar bagi pribumi yang bisa dilihat dari beberapa aspek atau kondisinya seperti Kondisi Pendidikan, Kolonial Belanda yang memberikan kesempatan kepada masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan. Itu terbukti dengan didirikannya sebuah sekolah yang mendapat dukungan pemerintah pada tahun 1824 di Minangkabau, tepatnya di Padang. Sekolah ini setelah 4 tahun ditutup. Hal itu disebabkan adanya rasa curiga dari masyarakat terhadap misi kristenisasi terhadap anak-anak mereka yang bersekolah disana. Kemudian dilihat dari segi Pemerintahan, Sejak Letkol. Raaff memperkenalkan dualisme corak pemerintahan di Minangkabau, Penguasa kolonial Belanda memiliki keinginan untuk menerapkan nilai-nilai

aristokrasi di daerah ini. Sejalan dengan tujuan penguasa kolonial Belanda, Letkol Raaff sengaja menyusun bentuk pemerintahan yang baru secara hirarki, mulai dari tingkat dusun sebagai unit kekuasaan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Lalu bisa dilihat dari Kondisi Ekonomi Sistem tanam paksa di Minangkabau dilaksanakan pada tahun 1847 dibawah pimpinan Andreas Victor Michiels yang merupakan seorang Mayor Jenderal. Ketika AV Michiels menerapkan sistem tanam paksa kopi, ia mewajibkan setiap keluarga menanam sekurang-kurangnya 150 batang kopi. Tahun 1908 tanam paksa di Minangkabau dihapus. Hal ini dikarenakan banyak rakyat yang menderita karena beban pekerjaan yang berat dan tingginya pajak. Hak atas kepemilikan tanah dan hak lainnya juga dirampas dan diusik oleh pihak Belanda dan 2) sistem pendidikan di Minangkabau didirikan berdasarkan keturunan dan status, bahasa Belanda merupakan bahasa wajib pada waktu itu. Sekolah yang didirikan Belanda pada masa itu ialah Sekolah Raja, Sekolah Kelas Satu, Sekolah Kelas Dua, Sekolah Desa, Sekolah Lanjutan, Sekolah Normal untuk perempuan, dan Schakelschool. Sekolah Raja merupakan sekolah yang dipandang tinggi oleh rakyat Minangkabau. Di samping sekolah tersebut didirikan juga sekolah khusus untuk orang Cina dengan nama Hollands Chinese School (HCS), Amhonsche School untuk orang Ambon yang tinggal di Minangkabau, Hollandsch Inlandsche School (HIS) didirikan di Padang dan Bukittinggi, untuk orang Belanda dan Indonesia yang berasal dari orang bangsawan, pegawai Belanda atau orang yang terpandang dalam masyarakat Minangkabau, seperti keluarga Tuanku Laras, Demang dan Jaksa, lalu sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang lama pendidikannya 3 tahun atau ada juga yang 4 tahun, Selanjutnya juga dibuka Sekolah Menengah Umum yang Algemeene Middelbare School (AMS) yang lama pendidikannya 3 tahun pula. Tujuan Belanda mendirikan lembaga pendidikan tidak lain ialah untuk kepentingan Belanda, yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerintahannya dan mengisi tenaga pada perusahaan swasta.

REFERENSI

- Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, dan Ervin Yunus Evendi. 2020. Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial Di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. Jurnal Artefak Volume 7 (1) : 22.
- Daliman. 2015. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Erman. 2014. Pergerakan Nasional Dalam Teks Media Di Minangkabau 1933-1936 (Kajian Terhadap Madjallah Raya). Padang : Imam Bonjol Press.
- IAIN IB. 2015. Pedoman Penulis Karya Ilmiah (Tugas Akhir Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Padang: IAIN IB Press.
- Martamin, Mardjani, dkk. 1997. Sejarah Pendidikan daerah Sumatera Barat. Jakarta : CV. Eka Dharma.
- M. Syarif. 2019. Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren. Volume 5 (1) : 112-113
- Veronika Horohiung. 2016. Pendidikan Formal Era Hindia Belanda di Kepulauan Sangihe Pada tahun 1848 – 194. Volume 5 (2) : 55.